

Analisis praktik monopoli dan diskriminasi pada kasus penjualan jasa asuransi kecelakaan penumpang feri di terminal feri kota Batam : studi putusan KPPPU No. 32/KPPU-L/2009 = Analysis of monopoly and discrimination practice in the case of ferry passengers accident insurance service sales in Batam ferry terminal : study of KPPPU decision No. 32/KPPU-L/2009

Sianipar, Yizreel A. Alexander, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20279465&lokasi=lokal>

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang adanya dugaan praktik monopoli dan diskriminasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam kasus penjualan jasa asuransi kecelakaan penumpang feri di terminal feri Kota Batam sehingga dianggap menciptakan barriers to entry bagi perusahaan asuransi kecelakaan lain untuk masuk ke dalam pasar penjualan jasa asuransi kecelakaan tersebut. Penelitian ini difokuskan dengan melakukan analisis yuridis terhadap putusan KPPPU No. 32/KPPU-L/2009, dengan melakukan penjabaran terhadap unsur-unsur dalam Pasal 17 dan Pasal 19 huruf d Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menemukan bahwa KPPPU tidak konsisten dalam membuktikan unsur-unsur dalam Pasal 17 dan Pasal 19 huruf d Undang-undang No. 5 Tahun 1999, khususnya berkaitan dengan masalah definisi dari pasar bersangkutan.

.....This thesis discuss about the conjecture of monopoly and iscrimination practice in which has conducted by businessmen in the case of selling accident insurance services to passengers in Batam ferry terminal. Later, this activity has considered create barriers to entry for other accident insurance companies to enter the market of accident insurance services sale. The research has focused on juridical analysis upon the KPPPU? decision No 32/KPPU-L/2009 by elaborating and identifying elements of article 17 and 19 letter d under the Law No 5 in 1999. This research uses normative juridical approach with descriptive methods of qualitative data analysis. Result shows that KPPPU is not consistent in proving the elements of article 17 and 19 letter d Law No 5 in 1999, especially in relation to relevant market issue.